

**EFEK DARI PENDAPATAN REGIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
DI PROVINSI MALUKU UTARA**

**Amran Husen  
Muammil Sun'an**

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Khairun

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Khairun

**Abstrach:** *The purpose of this study was to analyze the influence of bound variabels of economic growth in North Maluku Province, and also analyze the influence of independent variables on local revenues, general allocation funds, special allocation funds and revenue sharing funds, on economic growth in North Maluku Province, and how much influence from each of these factors. The data used are primary and secondary data. Data analysis used in this research is regression equation analysis. The results of the analysis test show that, H1: Regional Original Income has a positive and significant effect on Economic Growth that is seen from the results of the probability regression analysis of 0.088 greater than the value of 0.05. next H2: General Allocation Funds have a positive and significant effect on Economic Growth that is seen from the results of the test of the probability regression coefficient of 0.763 greater than the value of 0.05. Then the results of the H3 test: Special Allocation Funds have a positive and significant effect on Economic Growth that is seen from the test results of the probability regression coefficient analysis of 0.500 greater than the probability value of 0.05. Furthermore H4: Funds for Results have a positive and significant effect on Economic Growth that is seen from the test results of the analysis of the probability regression coefficient of 0.304 greater than the probability value of 0.05.*

**Keywords:** *Regional Original Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Profit Sharing Funds, Economic Growth.*

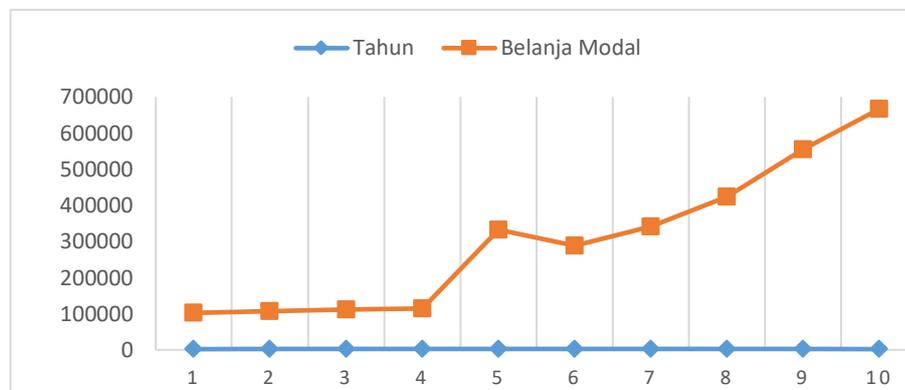
## **PENDAHULUAN**

Penelitian dengan memposisikan anggaran pendapatan sebagai variabel mediasi antara lain dilakukan oleh Walidi (2009) yang menyimpulkan bahwa anggaran pendapatan positif memediasi hubungan antara DAU dengan pendapatan per kapita. Muis (2011) melaporkan bahwa anggaran pendapatan dapat secara positif memediasi hubungan antara DAU dan DAK dengan pertumbuhan ekonomi. Temuan yang berbeda diungkapkan oleh Uhise (2013) yang menemukan bahwa anggaran pendapatan negatif memediasi hubungan antara DAU

dengan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan serupa dengan Uhise juga diungkapkan oleh Afriani *et al.*(2012) bahwa anggaran pendapatan tidak memediasi hubungan antara PAD dan DAU dengan pertumbuhan ekonomi. Amnah (2014) menyimpulkan bahwa anggaran pendapatan mediasi hubungan antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi tetapi tetap sejalan dengan Afriani (2012) dan Uhise (2013) dalam menyimpulkan bahwa hubungan antara DAU dan DAK dengan pertumbuhan ekonomi tidak dimediasi oleh belanja modal. Dari berbagai hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa

sifat mediasi anggaran pendapatan dalam hubungan antara pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil positif dan negatif. Selain itu pada penelitian terdahulu belum mengikutsertakan variabel

Dana Bagi Hasil (DBH) dalam model empiris penelitiannya. Meskipun nilai DBH jauh lebih kecil dari DAU akan tetapi besarnya hampir dua kali lipat nilai DAK.



**Gambar 1. Perkembangan Anggaran pendapatan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2006-2015**

Tahun 2006 alokasi anggaran pendapatan tercatat sebesar Rp.100.322 milyar. Tahun 2007 anggaran pendapatan tercatat naik menjadi Rp. 104.885 milyar atau meningkat 4,58%. Tahun 2008 anggaran pendapatan yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 109.220 milyar, tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 111.984 milyar, atau naik sebesar 2,53%. Tahun 2010 anggaran pendapatan tercatat Rp. 329.769 milyar, dan tahun 2011 menurun menjadi Rp. 286.028 atau turun sebesar 13,26%. Tahun 2012 meningkat anggaran pendapatan di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 339.327 milyar, tahun 2013 anggaran pendapatan tercatat sebesar Rp.422.215 milyar, atau meningkat 24,24%. Tahun 2014 benaja modal tercatat sebesar Rp.552.190,

milyar meningkat ditahun 2015 menjadi Rp.664.091 milyar, atau naik 20,26%.

Dasar argumentasi terhadap pentingnya penelitian ini didasarkan pada fakta empiris bahwa hingga 2014 kebutuhan fiskal Provinsi Maluku Utara seharusnya sebesar Rp.2. 953.758.287.068, triliun tetapi kapasitas/kemampuan fiskal Provinsi Maluku Utara baru sebesar Rp.311.691.000.000. Artinya Provinsi Maluku Utara masih bergantung pada pemerintah pusat dalam bentuk DAU untuk menutupi celah fiska sebesar Rp.2.642.067.287.068 triliun. Idealnya belanja modal memiliki pengaruh atau memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah berupa ruang fiskal pada pertumbuhan ekonomi. Dengan ruang fiskal yang diperoleh dari peningkatan pendapatan di berbagai sektor dan

penurunan kewajiban pembayaran utang serta dari efektivitas penggunaan anggaran dapat menunjang terciptanya ruang fiskal yang cukup memberi ruang untuk alokasi belanja modal. Karena belanja modal merupakan belanja pemerintah yang bersifat

produktif dan dapat digunakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku Utara.



Sumber Data :Bappeda Provinsi Maluku Utara 2016

**Gambar 2. Proyeksi kebutuhan DAU Provinsi Maluku Utara Tahun 2014**

Data di atas, penerimaan dan pengeluaran pemerintah Propinsi Maluku Utara begitu besar tetapi kurang mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Pemberian otonomi yang lebih

besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik.

Perbedaan nilai PAD dan dana perimbangan antar daerah memiliki dampak yang berbeda pula pada pertumbuhan ekonominya. Salah satu cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu melalui capaian nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data PDRB provinsi Maluku Utara untuk tahun 2010-2017 diketahui bahwa PDRB menunjukkan tren yang positif. Hal inilah yang melandasi pemilihan Provinsi Maluku Utara sebagai objek penelitian oleh

penulis, karena dianggap akan cukup. Berdasarkan uraian diatas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI MALUKU UTARA".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan apakah PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara?.
2. Untuk membuktikan apakah DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara?.
3. Untuk membuktikan apakah DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara?.
4. Untuk membuktikan apakah DHB berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara?
5. Untuk membuktikan apakah PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara?.

Manfaat Praktis adalah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah sekaligus sebagai referensi untuk menentukan strategi yang tepat guna menggali pendapatan daerah dengan sumber daya yang dimiliki agar dapat

meningkatkan alokasi anggaran pendapatan demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Selanjutnya, mengacu pada pasal 6 UU No.33 Tahun 2004, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

### **Pajak Daerah**

Pajak merupakan sumber pendapatan yang utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta. Pajak disamping berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama juga berperan sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Menurut Meier (1995:197-198) ada empat kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk memungut suatu jenis pajak dinegara yang sedang berkembang: (1). Sebagai suatu sumber penerimaan potensial; (2). Dampak terhadap alokasi sumber ekonomi; (3). keadilan; (4). administrasinya rendah; Pengelompokkan pajak didasarkan atas golongannya, lembaga pemungut dan menurut sifatnya (Setu Setyawandan Eny S:2004),yaitu:(1).

Berdasarkan Golongannya : *Pajak Langsung* adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak. Misalnya Pajak Penghasilan. *Pajak Tidak Langsung* adalah pajak yang pembebanannya dapat dibebankan ke padapihaklain. Misalnya PPN dan PPN- BM, PBB. (2). Berdasarkan Lembaga Pemungutnya: *Pajak Pusat* yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan berfungsi untuk mengisi anggaran Negara dan mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Misalnya Pajak.

Penghasilan, PPN dan PPN-BM, Bea Materai. *Pajak Daerah* yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Misalnya Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan lain-lain. (3). Berdasarkan Sifatnya: *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya Pajak Penghasilan. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Misalnya PPN, PPN-BM, PBB. Pajak adalah iuran yang dikumpulkan dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### **Retribusi Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Perbedaan utama retribusi dari pajak adalah pada retribusi terdapat kontra-prestasi langsung. Hal tersebut berarti pihak pembayar retribusi melakukan pembayaran karena ditujukan untuk memperoleh prestasi tertentu dari pemerintah misalnya untuk mendapatkan izin atas usaha tertentu. Pungutan atas retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu (Siahaan, 2013).

### **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain terdiri dari bagian laba

dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari laba Bank Pembangunan Daerah dan bagian laba BUMD lainnya. Tujuan pembentukan perusahaan daerah adalah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan menambah penghasilan daerah. Bidang usaha BUMD mencakup berbagai aspek pelayanan dengan mengutamakan pemberian jasa kepada masyarakat, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memberikan sumbangan bagi ekonomidaerah yang keseluruhannya harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas ekonomiperusahaan yang sehat. Dalam pasal 25 UU no. 25 tahun 1962 tercantum penggunaan laba bersih hasil perusahaan daerah yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya dari kekayaan daerah yang dipisahkan :
  - a) Untuk pembangunan daerah sebesar 30%
  - b) Untuk anggaran pendapatan daerah sebesar 25%
  - c) Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan yang besarnya masing-masing daerah berjumlah 45%.
2. Bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah dipisahkan setelah dikeluarkan zakat yang dipandang perlu:
  - a) Untuk dana pembangunan sebesar 8% dan untuk anggaran sebesar 7%.

- b) Untuk pemegang saham 40% dibagi menurut perbandingan nilai nominal dari saham-saham.
- c) Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan yang besarnya masing-masing ditentukan dalam peraturan daerah berjumlah 45%.

pemerintah daerah di Indonesia mendirikan BUMD atas dasar pertimbangan (Devas,1989):

1. Menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.
2. Dianggap cara yang efisien untuk menyediakan layanan masyarakat.
3. Untuk menghasilkan penerimaan untuk pemerintah daerah.

BUMD mencakup berbagai kegiatan perekonomian yang luas, tidak hanya terbatas pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat daerah. Jenis BUMD yang ada di Indonesia meliputi kegiatan-kegiatan antara lain (Bratakusumah dan Solihin, 2002): penyediaan air minum pengelolaan persampahan, rumah pematangan hewan, pengelolaan pasar, pengelolaan objek wisata, pengelolaan sarana wisata, perbankan dan perkreditan, penyediaan sarana transportasi, industri lainnya, dan jasa-jasa lainnya.

#### **Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 terdiri dari :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan ataupun pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

#### **Dana Perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004 dan PP No.55 Tahun 2005). Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah (Pasal 3 ayat (2) UU No. 33 Tahun 2004).

#### **Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil yaitu dana yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan

umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi. Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak terdiri dari: (a). Pajak Bumi bangunan (PBB); (b). Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); (c). Pajak Penghasilan (PPH).

Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Sumber Daya Alam, yang berasal dari : (1). Kehutanan; (2). Pertambangan Umum; (3). Perikanan; (4). Pertambangan minyak bumi; (5). Pertambangan gas bumi.

#### **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 angka 21). Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan pemerintahan pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

### **Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 angka 23), dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada "proses", karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, anggaran pendapatan merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Anggaran pendapatan digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan anggaran pendapatan dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya anggaran pendapatan merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran pendapatan dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara financial (Ardhani, 2011).

### **Hubungan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Selanjutnya hal tersebut akan meningkatkan nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh Brata (2004) menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena daerah lebih leluasa dalam memanfaatkan PAD sesuai dengan agenda pembangunan ekonominya. Akan tetapi hubungan antara

PAD dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya meningkatkan penerimaan daerahnya. Sebagaimana diketahui, belakangan ini banyak pihak, khususnya dunia usaha, yang mengeluhkan soal begitu banyaknya pajak dan/atau retribusi yang justru menekan daya saing daerah. Kesimpulan serupa juga diungkapkan oleh Gunantara dan Dwirandra (2014). Keduanya menyimpulkan bahwa dengan meningkatnya PAD, daerah menjadi lebih mampu dalam memberikan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat lokal. Selanjutnya ketersediaan infrastruktur publik tersebut akan menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi yang beriringan dengan meningkatnya produktivitas.

#### **Hubungan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Modal dasar desentralisasi fiskal seharusnya berasal dari PAD. Tetapi nyatanya, PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20% (Kuncoro, 2004 dalam Santosa, 2013). Sehingga untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum (DAU). Pemanfaatan DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Fleksibilitas dalam pemanfaatan DAU baik melalui belanja rutin, pembangunan/ infrastruktur/ modal, ataupun belanja lainnya diharapkan akan memunculkan pelaku-pelaku ekonomi baru dalam masyarakat. Penelitian

oleh Maryati dan Endrawati (2010) menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU berperan sangat signifikan karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU. Setiap DAU yang diterima pemerintah daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah belanja modal.

#### **Hubungan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pengalokasian DAK lebih difokuskan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Berbeda dengan DAU, pemanfaatan DAK oleh daerah tidaklah fleksibel dan leluasa tetapi harus mengikuti berbagai regulasi dari pemerintah pusat. Dengan fokus alokasi kepada belanja fisik sarana dan prasarana infrastruktur, aset tetapi hasil belanja DAK akan menjadi modal dasar bagi masyarakat di daerah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ekonomi yang mengarahkan pada peningkatan output dan kesejahteraan masyarakat. Taaha et al. (2009) dan Santosa (2013) menemukan hubungan positif antara DAK dengan pertumbuhan ekonomi dengan penjelasan bahwa alokasi DAK lebih diarahkan pada investasi pembangunan berupa sarana fisik penunjang yang berguna bagi publik masyarakat.

### **Hubungan DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

DBH dialokasikan berdasarkan prinsip *by origin* dengan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan. Wandira (2013) menyebutkan bahwa DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari PAD, DAU, dan DAK. Taaha *et al.* (2009) menemukan hubungan positif dan signifikan antara DBH dengan pertumbuhan ekonomi. Alokasi DBH sebagai sumber pembiayaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana ekonomi akan menunjang kegiatan produksi barang dan jasa oleh investor baik dari masyarakat setempat ataupun dari luar daerah yang bersangkutan. Dengan munculnya kegiatan investasi selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja, dan menciptakan *multiple effect* sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pujiati (2008) dan Santosa (2013).

### **Penelitian Terdahulu**

Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula pendapatan belanja daerah (Ardhani, 2011 dalam Wandira, 2013). Hal serupa diungkapkan oleh Brata (2004) bahwa peningkatan PAD dapat meningkatkan investasi anggaran pendapatan pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Penelitian oleh Kusnandar dan Siswantoro (2011) menyimpulkan bahwa PAD

sangat berpengaruh terhadap alokasi anggaran pendapatan bahkan pada tingkat keyakinan 99% ( $\alpha=1\%$ ). Walaupun persentase PAD cukup kecil dari total pendapatan yang diterima oleh daerah (sekitar 7%) namun sangat berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Dengan meningkatnya PAD daerah lebih leluasa dalam merencanakan dan mengalokasikan kegiatan atau pengeluaran berdampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur. Penelitian lainnya dengan kesimpulan sejenis dilakukan oleh Kartika dan Dwirandra (2014). PAD yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik yang mana semua hal tersebut dialokasikan melalui belanja modal.

### **Pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Abdullah dan Halim (2004), menyatakan bahwa dana transfer jangka panjang berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Penelitian oleh Oktrinatmaja (2011), menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi anggaran pendapatan daerah. DAU merupakan sumber utama pembiayaan bagi daerah untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di daerahnya

sebagai akibat tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Penelitian lainnya oleh Masdjojo dan Sukartono (2009), memperkuat basis teori penyusunan anggaran yang bersifat *incrementalism*, yaitu alokasi anggaran belanja akan menyesuaikan dengan bertambah/ berkurangnya jumlah anggaran pendapatan daerah.

#### **Pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Secara umum, DAK menyerupai dana inpres (Instruksi Presiden) yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan khusus di dan oleh daerah. Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Sesuai PP No. 55/2005 tentang dana perimbangan, penggunaan DAK dilaksanakan sesuai dengan juknis serta DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

#### **Pengaruh DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Wandira (2013) menyebutkan bahwa DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan

memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari PAD, DAU dan DAK. Penelitian oleh Wandira (2013) menyimpulkan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Hasil ini menjelaskan bahwa daerah dengan realisasi DBH yang besar cenderung memiliki anggaran pendapatan yang besar pula. Hasil ini memberikan indikasi kuat bahwa perilaku anggaran pendapatan akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. Sehingga jika anggaran DBH meningkat maka alokasi anggaran pendapatan pun meningkat. Kesimpulan serupa lainnya disampaikan oleh Indra (2010) dan Maryadi (2012).

#### **Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi anggaran pendapatan didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Melalui peningkatan anggaran pendapatan diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk kegiatan produksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut model Rostow dan Musgrave (Mangkoesobroto, 1997 dalam Hendarmin, 2012) dijelaskan bahwa model anggaran pendapatan pemerintah pada tahap awal

perkembangan ekonomidirikan dengan besarnya persentase investasi pemerintah terhadap total investasi. Hal inidisebabkan karena pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur untukpendidikan, kesehatan, dan transportasi.Lebih lanjut, Wagner menyebutkan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatanper kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat (Mangkoesoebroto, 1997 dalam Hendarmin, 2012). Sehingga secara tidak langsung ataupun langsung dalam hal dikehendaki PDB secara agregat atau pendapatan perkapita meningkat harusdiikuti dengan meningkatnya nilai pengeluaran pemerintah. Dengan semakin tinggi tingkatinvestasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannyamampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan (Mardiasmo, 2002 dalam Adi, 2006).

#### **Peran Mediasi Anggaran pendapatan dalam Hubungan antara PAD, DAU, DAK, dan DBH dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Penelitian dengan model empiris sedikit berbeda yaitu dengan menyertakan anggaran pendapatan sebagai variabel independen bersama dengan variabel pendapatan daerah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain dilakukan oleh Setiyawati dan Hamzah (2007) yang menyimpulkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara DAK dan

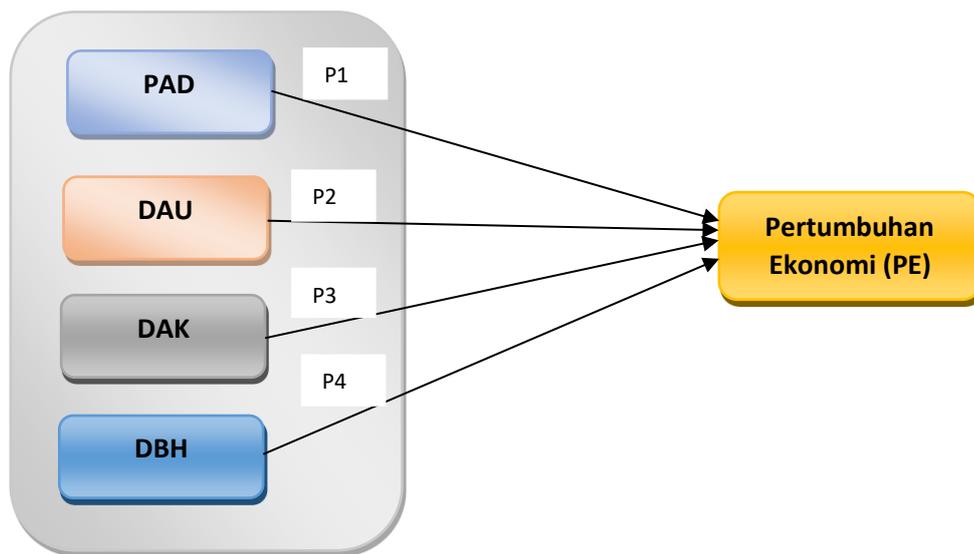
belanja pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Prasetya (2011), menyimpulkan pula bahwa PAD, DAU,DBH dan anggaran pendapatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara DAK berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dengan model empiris yaitu anggaran pendapatan sebagai variabel dependen antara lainoleh Wandira (2013), menyimpulkan bahwa PAD, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap anggaran pendapatan sementara DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal. Penelitian lainnya oleh Maryadi (2012) menyimpulkan bahwa PAD, DAU, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

#### **Kerangka Konsep Penelitian**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU berperan dalam pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), yaitu dengan menutup celah fiskal (*fiscal gap*) yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan

dana dalam APBN. Namun dalam keadaan tertentu, DAK dapat juga membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil

berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama dari pemberian DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Dana Bagi Hasil itu sendiri dapat bersumber dari pajak dan sumber daya alam.



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

## METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara dengan sampel penelitiannya adalah data keuangan untuk 6 tahun terakhir (dalam rentang waktu Tahun 2012 s/d 2017), dengan pertimbangan karena lebih mencerminkan kondisinya sekarang.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk dokumen yang bersifat

kuantitatif, yaitu data berbentuk angka-angka. Sumber datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, Kantor Gubernur Maluku Utara bagian Keuangan, BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, serta dari berbagai literatur dan artikel yang dimuat di media massa, baik cetak maupun elektronik yang relevan dengan pokok penelitian seperti Laporan Realisasi APBD Tahun 2011-2017 dan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah, serta Anggaran

pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2012-2017.

#### Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber dari dokumen laporan APBD yang diperoleh dari situs Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui [www.provmalut.go.id](http://www.provmalut.go.id). dan BPS Provinsi Maluku Utara melalui [www.bps.go.id/malut](http://www.bps.go.id/malut). Jadi teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan observasi. Dokumen yang dapat digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya (Hasan, 2002).

#### Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis persamaan regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 Y_1 + \epsilon_2$$

Keterangan:

$X_1$  adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$X_2$  adalah Dana Alokasi Umum (DAU)

$X_3$  adalah Dana Alokasi Khusus (DAK)

$X_4$  adalah Dana Bgi Hasil (DBH)

$Y$  adalah Pertumbuhan Ekonomi (PE)

$\beta_1, \dots, \beta_9$  adalah koefisien regresi variabel independen

$\beta_0$  adalah intercept/konstanta

#### Defenisi Operasional Variabel

1. PAD; yang dimaksud dalam penelitian ini adalah besarnya pendapatan asli daerah yang diterima dari berbagai sumber penerimaan PAD di Provinsi Maluku Utara, besaran variabelnya dinyatakan dalam rupiah (Rp).
2. DAU; yang dimaksud dalam penelitian ini adalah besarnya Dana Alokasi Umum yang diterima Provinsi Maluku Utara dalam satu tahun, dan besaran variabelnya dinyatakan dalam rupiah (Rp).
3. DAK; yang dimaksud dalam penelitian ini adalah besarnya Dana Alokasi Khusus yang diterima Provinsi Maluku Utara dalam satu tahun, dan besaran variabelnya dinyatakan dalam rupiah (Rp).
4. DBH; yang dimaksud dalam penelitian ini adalah besarnya Dana hasil yang diterima Provinsi Maluku Utara dalam satu tahun, dan besaran variabelnya dinyatakan dalam rupiah (Rp).
5. PE; yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang dicapai Provinsi Maluku Utara dalam satu tahun, dan besaran variabelnya dinyatakan dalam persentasi (%).

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Uji Persamaan regresi

Perhitungan koefisien jalur dilakukan dengan analisis regresi melalui *software EvIEWS 0.9 for Windows*. Pengujian

persamaan pertama dilakukan untuk melihat pengaruh Model variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Analisis Uji Regresi**  
**Dependent Variable: Peertumbuhan Ekonomi**

**Method: Least Squares**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.519955	1.821575	3.579295	0.0700
PAD	0.659150	0.060324	10.92676	0.0083
DAU	0.088298	0.256955	-0.343634	0.7639
DAK	0.091891	0.112668	0.815588	0.5004
DBH	0.087910	0.064172	-1.369903	0.3042

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dengan nilai *prob.* yaitu  $0.008 < 0.05$  menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dengan nilai *prob.*  $0.763 < 0.05$  menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dana

alokasi khusus dengan nilai *prob.*  $0.500 < 0.05$  menunjukkan bahwa DAK berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian dana bagi hasil dengan nilai *prob.*  $0.304 < 0.05$  menunjukkan bahwa DBH berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan hasil dari pengujian analisis kedua Maka persamaan strukturalnya adalah:

$$PE (Y_1) = 6.51995506776 + 0.659149860743*PAD - 0.0882984606384*DAU + 0.0918908208551*DAK - 0.0879095937954*DBH$$

Nilai koefisien PAD sebesar 0,659 menyatakan jika terjadi peningkatan PAD sebesar satu persen maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 6.59 persen periode berjalan.

Kemudian Nilai koefisien DAU sebesar -0,088 menyatakan apabila terjadi DAU menurun sebesar satu persen maka pertumbuhan ekonomikan menurun sebesar 0,88 persen periode berjalan. Nilai koefisien DAK sebesar

0,091 persen periode berjalan, menyatakan jika terjadi peningkatan DAK sebesar satu persen maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 0.91 persen periode berjalan. Nilai koefisien DBH sebesar -0.087 menyatakan jika terjadi penurunan DBH sebesar satu persen maka pertumbuhan

ekonomi akan menurun sebesar -0.87 persen periode berjalan.

#### Analisis Statistik Uji Simultan (Uji-f)

Uji F menunjukkan seberapa besar pengaruh *variabel independent* secara bersama-sama terhadap *variabel dependent*.

**Tabel 2 Hasil Uji F**  
**Dependent Variable: PE**

Method: Least Squares

Included observations: 7

R-squared	0.998642	Mean dependent var	13.71429
Adjusted R-squared	0.995925	S.D. dependent var	7.631389
F-statistic	36.75614	Durbin-Watson stat	2.247020
Prob(F-statistic)	0.002715		

Berdasarkan hasil regresi pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara tahun 2011-2017 dengan menggunakan taraf keyakinan 95 persen ( $\alpha = 5$  persen), dengan *degree of freedom for numetor* (dfn) = 4 ( $k-1 = 3-1$ ), maka diperoleh *Adjusted R* sebesar 0,976. Dari hasil regresi pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara diperoleh F-statistik sebesar 36,75614 dan nilai probabilitas F-statistik 0,002. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian diperoleh *Adjusted R* sebesar

0,995. Dari hasil regresi pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara diperoleh F-statistik sebesar 36,75614 dan nilai probabilitas F-statistik 0,002. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak diantara nol dan satu. Semakin besar nilai  $R^2$  berarti model tersebut dikatakan baik karena hubungan antara variabel dependen dengan variabel

independen semakin erat. Sebaliknya jika nilai R2 mendekati angka nol maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabilitas dari variabel dependen. Dari hasil regresi yang disajikan dalam Tabel 4.8 dan 4.9 nilai Adjusted *R-squared* adalah sebesar 0,976 dan 0.995. Hal ini berarti bahwa, variabel-variabel independen dalam penelitian yaitu PAD, DAU, DAK, DBH dan Pertumbuhan Ekonomi mampu menjelaskan variabel dependen Melalui Belanja Modal sebesar 9,76 persen dan 9.95 persen, sedangkan sisanya dari kedua persamaan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

#### **Pembahasan**

##### **Hasil Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Di Provinsi Maluku Utara**

Hasil analisis mengacu pada tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sesuai dengan hipotesis Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh *Chan dan Ho dalam Abdu Rahman* (2015) dan *Adi* (2016). Semakin tinggi PAD, maka semakin meningkat laju pertumbuhan ekonominya. Ini dikarenakan pajak dan retribusi daerah dikembalikan kepada masyarakat untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian daerah. DAU juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi pengaruhnya adalah negatif. Hasil ini tidak sesuai dengan

hipotesis kedua, Ini menunjukkan semakin besar DAU yang diperoleh, maka semakin menghambat atau mengurangi laju pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Artinya PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui belanja modal di Provinsi Maluku Utara.

##### **Hasil Analisis Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Di Provinsi Maluku Utara**

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi dipemerintah Provinsi Maluku Utara. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh *Abdullah dan Halim* (2004) yang membuktikan bahwa transfer dari pemerintah pusat berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah. Artinya, stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer yang diberikan kepada tiap daerah. Transfer dari pemerintah pusat yang diwujudkan dalam Dana Alokasi Umum untuk Dana Perimbangan merupakan sumber utama Pemda untuk menjaga dan

menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pembangunan. Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Pambudi, 2007).

#### **Hasil Analisis Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Di Provinsi Maluku Utara**

Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dipemerintah. Daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria yaitu, kriteria umum berdasarkan indeks fiskal netto, kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah, kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait. DAK digunakan untuk membangun sarana dan prasarana fisik. DAK yang khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini apabila dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur. Hal ini sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan dan membangun perekonomian nasional yang lebih berdaya saing. Artinya DAK memiliki kaitan erat

dengan belanja pembangunan daerah. DAK dipakai untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan prioritas pada bidang kegiatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko,2002).

#### **Hasil Analisis Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Di Provinsi Maluku Utara**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh variabel DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan dengan arah positif. Hasil ini berarti bahwa DBH memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini berarti menunjukkan bahwa peningkatan DBH dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah karena dengan meningkatnya DBH

pemerintah dapat memenuhi pembiayaan untuk belanja daerahnya sendiri. Dengan demikian dana bagi hasil daerah juga akan semakin meningkat karena tidak lagi perlu bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah sebagai sebuah lembaga (*steward*) yang diberikan kepercayaan untuk mengelola penerimaan daerah melalui dana perimbangan sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Menurut Wandira (2013), DBH merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Dalam penelitiannya, Hendriwiyanto dan Kholis (2014), menyimpulkan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Maluku utara.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian diatas, maka dihasilkan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Secara empiris penelitian ini persamaan substruktural I membuktikan bahwa

Belanja Modal dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dalam model substruktural, pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi dilihat dari variabel DAU lebih tinggi dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus. Hal ini menunjukkan nilai positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah.

2. Secara simultan PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.
3. Secara Parsial PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.
4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa memediasi hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil sberpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

### Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran terhadap hasil penemuan ini yaitu :

1. Pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara nampaknya perlu memperhatikan alokasi belanja modal yang harus

dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan tetap mempertimbangkan dampak positifnya terhadap PAD, DAU, DAK dan DBH.

2. Dengan melihat adanya fenomena yang berbeda dari pengaruh pertumbuhan ekonomi secara signifikan, maka saran bagi peningkatan PAD dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pemerintah harus berusaha keras dan menjadi perhatian besar bagi pemerintah daerah khususnya pada sektor-sektor yang memberikan kontribusi pada daerah.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk Menambahkan indikator untuk mengukur kinerja keuangan daerah, Menggunakan data laporan keuangan daerah paling tidak lima tahun terakhir, Memperluas objek penelitian.
4. Bagi penulis, dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Aprizay, Yudi Satrya., Darwanis., Muhammad Arfan. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Akuntansi Pascasarjana

Universitas Syiah Kuala. Vol.3, No.1 : 140-149

- Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi kedua. Penerbit PT.Indeks. Jakarta.
- Djaenuri, Aries 2012. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Dewi, Sakita Laksmi dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2013. Pengaruh PAD, PMA Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. e-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 2, No. 11.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> . Diakses tanggal 28 April 2017
- Gunantara, Putu Candra dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Bali. e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.3
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Abdullah Syukriy. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2 No. 2, November.
- Hendriwiyanto, Guntur dan Kholis, Nur. 2014. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol.3, No. 1.
- Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

- Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Volume 5 No. 2, Desember, Hal.68-84.
- Purba, Adearman. 2006. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun". Tesis pada Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan. [dipublikasikan]
- Rustiono, Deddy. 2008. "Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah". Tesis pada Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro, Semarang. [dipublikasikan]
- Setiyawati, Anis dan Hamzah Ardi. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 4 No. 2, Desember, Hal.211-228.
- Sodik, Jamzani. 2007. "Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia", dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Vol.12, No.1, Hal.27-36. [14 Januari 2012, 13:56]
- Winarno, Wing Wahyu. 2009. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi Kedua. penerbit STIM YKPN. Jogjakarta.
- Yunan. 2009. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". Tesis pada Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan. [dipublikasikan]